

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS
TAHUN 2021**



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

TAHUN 2022

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,79	67,01	0,33
2	Angka Kemiskinan	13,50	14,25	5,56
3	Angka Pengangguran*	3,29	3,29	0
4	Pertumbuhan Ekonomi	0,24	2,33	870,8
5	Pendapatan Per kapita	48.800.000	51.040.000	4,59
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,26	0,28	7,7

Sumber data : - Kabupaten Musi Rawas Dalam Angka 2022 (BPS Kab. Musi Rawas)
- Website BPS Prov. Sumatera Selatan

Keterangan :

* : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

** : PDRB Per Kapita Harga Berlaku

II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	62,90%
1.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	147
1.2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9.120
1.3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9.120
1.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	221
1.5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	867
1.6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak	295

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
	usia dini	
1.7	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	304
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,92%
2.1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	381
2.2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	46.377
2.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	20.753
2.4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	46.377
2.5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.753
2.6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.110
2.7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	910
2.8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.923`
2.9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	637
2.10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	283
2.11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	10
2.12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	240
2.13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	233
2.14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.674
2.15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.260
2.16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	318
2.17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	70
2.18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	38
2.19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	51
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,19%
3.1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	388
3.2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	46.377
3.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	20.753
3.4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya	46.377

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
	pendidikan	
3.5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.753
3.6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2110
3.7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	910
3.8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.923
3.9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	637
3.10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	283
3.11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	10
3.12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	240
3.13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	233
3.14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.674
3.15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.260
3.16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	318
3.17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	70
3.18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	38
3.19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	51
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	42,18%
4.1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	11
4.2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.840
4.3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.840
4.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	34
4.5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	17
4.6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	17
4.7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	318
4.8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	14

2. Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	100%
1.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
2.1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	0
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,63%
3.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	MgSO4 20% 18 ampul, MgSO4 40% 125 mpul
3.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Pj Dinkes 1 org, Pj Bidan Koordinator Puskesmas 19 org, Pj Bidan Desa 199 org, Pj Dokter umum 19 org
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92,12%
4.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Phenobarbital 2 ktk, oxicotin 1,0 IU 6 ktk Diazipan injeksi 7 ktk, ampicilin 1000mg 3 kotak
4.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Pj Dinkes 1 org, Pj Bidan Koordinator Puskesmas 19 org, Pj Bidan Desa 199 org, Pj Dokter umum 19 org
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,39%
5.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Oksitetrasiklin salep mata 1% 24 kotak, itomenadion injeksi 7 kkt
5.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Pj Dinkes 1 org, Pj Bidan Koordinator Puskesmas 19 org, Pj Bidan Desa 199 org, Pj Dokter umum 19 org
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92,51%
6.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Vit.A 200.000 IU 1.083 botol
6.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Pj Dinkes 1 org, Pj Bidan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		Koordinator Puskesmas 19 org, Pj Bidan Desa 199 org, Pj Dokter umum 19 org
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86,66%
7.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tambah Darah 2810 tablet
7.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Pj Dinkes 1 org, Pj Bidan Koordinator Puskesmas 19 org, Pj Bidan Desa 199 org, Pj Dokter umum 19 org
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	81,48%
8.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Cholesterol test 150 ktk, glucosa test 151 ktk dan asam urat test 150 ktk
8.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes 1 org., PJ Puskesmas 19 orang, Pj Dokter umum PKM 19 org
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,31%
9.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Lansia kit 19 puskesmas
9.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes 1 org., PJ Puskesmas 19 orang, Pj Dokter umum PKM 19 org
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77,61%
10.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	692.600 tablet
10.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes 1 org., PJ Puskesmas 19 orang, Pj Dokter umum

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		PKM 19 org
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	69,67%
11.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	239.200 tablet dan Benecheck glukosa 151 kotak
11.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes 1 org., Pj Puskesmas 19 orang, Pj Dokter Umum PKM 19 org
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	72,44%
12.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36.000 tablet
12.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes 1 org., Pj Puskesmas 19 orang, Pj Dokter Umum PKM 19 org
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	52,38%
13.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	944 paket, 15.700 tablet
13.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes 1 org., Pj Pengelola Program Puskesmas 19 org, Pj RS. Sobirin 1 org, Pj RS Muara Beliti 1 org
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	68,70%
14.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	720 test dan 300 pcs alkohol swab
14.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes 1 org., Pj Pengelola Program Puskesmas 26 org, Pj RS. Sobirin 1 org, Pj RS Muara Beliti 1 org

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	54,09%
1.1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	309.285
1.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	92544,58
1.3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-
1.4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-
1.5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	-
1.6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-
1.7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Ada
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0,00%
2.1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0,00%
2.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0,00%
2.3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0,00%
2.4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0,00%
2.5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata Pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada
2.6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada
2.7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	49,92%
3.1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	63,92%
3.2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	63,05%
3.3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	36,09%
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98,97%
4.1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada
4.2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	-
4.3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1
4.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-
4.5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	1
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,71%
5.1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	121.012

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
5.2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1.725
5.3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	126.908
5.4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-
5.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	-
5.6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	-
5.7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	33,51%
5.8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	-
5.9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	9,38%
5.10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	92,75%
5.11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	-
5.12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	-
5.13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	8,58%
5.14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	-
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00%
6.1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	77,96%
6.2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	92
6.3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada
6.4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak ada
6.5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	3
6.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-
6.7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	715
6.8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	715
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	76,36%
7.1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.420,49 KM
7.2	Panjang jalan yang dibangun	5 Km
7.3	Panjang jembatan yg dibangun	160,5 m
7.4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	89,83 Km
7.5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	108,70 m
7.6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0 m
7.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	150 m
7.8	Panjang jalan yang dipelihara	6,95 Km
7.9	Panjang jembatan yang dipelihara	0 m
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,00%
8.1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1
8.2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	50 orang
8.3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	-
8.4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-
8.5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada, SIRUP KAB MUSI RAWAS
8.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
8.7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-
8.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada, SIRUP KAB MUSI RAWAS
8.9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	-
8.10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0
8.11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0
8.12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analisis di wilayah kab/kota	0
8.13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0
8.14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	3
8.15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-
8.19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	3
8.20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-
8.21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-
8.22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	3
8.23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi -	0%

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0%
1.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	12.041
1.2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	1
1.3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	1
1.4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0
1.5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0
1.6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0
1.7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0
1.8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0
1.9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0
2.1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0 Ha
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,63%
3.1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	81.955 Ha
3.2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	85 unit
3.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,52 Ha
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	27,56%
4.1	Jumlah rumah di kab/kota	127.044
4.2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	3.618
4.3	Jumlah rumah tidak layak huni	35.008
4.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0
4.5	Rasio rumah dan KK	99,20%
4.6	Jumlah rumah pembangunan baru	1.084
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	98,06%
5.1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	12
5.2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	124.575
5.3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1.484
5.4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (onsite / offsite)	120.336
5.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0
5.6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	115.330
5.7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	8
5.8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	8

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
5.9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
1.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	11 kali pengaduan
1.2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	-
1.3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5
1.4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1
1.5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	6 SOP
1.6	Tersedianya sarana prasarana minimal	4 unit mobil Pemadam Kebakaran, 3 unit motor Patroli, 2 mobil Patroli, 1 unit Mobil Dalmas, 1 unit mobil Box Logistik, Pakaian Huru-hara
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	85,71%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	268.240
3.1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0%
3.2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	43.343
4.1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0%
4.2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0%
4.3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0%
4.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0%
4.5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%
4.6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0%
5.1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%
5.2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%
5.3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%
5.4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
6.1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	-
6.2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar,	3 sektor Pos

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
	sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sumber Harta
6.3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedia Petugas Piket di 4 Pos
6.4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0,00%
6.5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	4 unit mobil Pemadam Kebakaran, 22 buah selang, 16 buah Nozel, 4 Pasang Baju, 4 pasang Sepatu, 4 buah helm, 3 buah jam tangan, 3 buah tangga, 4 buah Kampak, 2 buah mesin
6.6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	85 Orang
6.7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tidak Ada
6.8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	85 Orang
7.	Waktu tanggap (responsetime) penanganan kebakaran	2 - 30 Menit

6. Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti (indikator SPM)	94,83%
1.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	200
1.2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	58.938
1.3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1
1.4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	55.891

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2
1.6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	3.830
1.7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1
1.8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	50
1.9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	28
1.10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	3
1.11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	4
1.12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	30
1.13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	4
1.14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1126
1.15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	30
1.16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	70
1.17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1.126
1.18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	52.025
1.19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2
1.20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	1
1.21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	2
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%
2.1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	3.520
2.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	14
2.3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1
2.4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	100
2.5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	14
2.6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	31

III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Evaluasi LPPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan Validasi terhadap Hasil EPPD Tim Daerah atas LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2019 se-Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 sampai dengan 17 September 2020. Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, Kabupaten Musi Rawas memperoleh peringkat **1 (satu) se-Provinsi Sumatera Selatan** dengan Skor Kinerja **3,5583** dan Status Kinerja **TINGGI**. Sedangkan untuk Evaluasi LPPD Tahun 2020 baru akan diumumkan pada Hari Otonomi Daerah Tahun 2022 pada tanggal 25 April 2022 mendatang.

b. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 menyatakan bahwa Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Tahun Anggaran 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

IV. RINGKASANN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No Urut	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
4.	Pendapatan	1.983.768.388.598,00	1.939.565.577.829,13	97,77
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	293.236.514.261,00	169.805.313.539,73	57,91
4.2	Pendapatan Transfer - LRA	1.622.165.719.987,00	1.706.834.606.689,40	105,22
4.3	lain-lain pendapatan daerah yang sah - LRA	68.366.154.350,00	62.925.657.600,00	92,04

No Urut	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
5.	Belanja	2.108.055.292.303,00	1.946.549.658.680,88	92,34
5.1	Belanja Operasi	1.282.380.457.869,00	1.155.960.914.062,88	90,14
5.2	Belanja Modal	515.427.568.480,00	489.600.670.001,00	94,99
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.480.174.720,00	4.266.678.169,00	31,65
5.4	BELANJA TRANSFER	296.767.091.234,00	296.721.396.448,00	99,98

Sumber Data : Laporan Realisasi APBD tahun 2021 *unaudited* (BPKAD Kab. Musi Rawas)

V. INOVASI DAERAH

Adapun inovasi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 sebanyak 72 (Tujuh puluh dua) inovasi, sebagaimana pada tabel berikut :

No	Judul Inovasi
1	Gendang Jawa (Gerakan Layanan Izin Usaha Perdagangan, Jasa dan Wirausaha)
2	DEWITA (Desa Wisata Tematik)
3	GOL MAPAN
4	One Day No Rice
5	Pakam (Pelayanan AK-1 Akurat Memuaskan)
6	Obral Sega
7	BEDA MURA SEMPURNA (BENGKEL PEMUDA MUSI RAWAS SEMPURNA)
8	SAJAHAI (Sentuh Aku Dengan Jari Mu)
9	GERTAK (Gerakan Cetak Di Tempat)
10	Lomba Lembaga PAUD, Bunda PAUD Desa dan Bunda PAUD Kecamatan
11	Peta Jitu (Peta Jajak Investasi Usaha)
12	PALA (Penguatan Kelembagaan Adat)
13	Tungku Pirolis Double Burner
14	Japing (Jahe Pinang)
15	Berkolaberantik (Bersama Sekolah Berantas Jentik)
16	BERAKSI PADEK (Bersama Secara Terintegrasi Atasi Balita Pendek)
17	Ngopi Ling (Ngobrol Seputar Informasi Lingkungan)
18	Kompot (Kompos Pot)
19	BUNDA PERI (Ibu dan Anak Peduli Kesehatan Gigi)
20	JAGUDA (Jaga Gula Darah)
21	AYO SIBATURI (Bergerak Selamatkan Ibu Bayi Tuah Negeri)
22	JANDA (Jaga Tekanan Darah)
23	POZITERASI (Pos Gizi Terintegrasi))
24	Smoke Fish Food (Ikan Asap/Salay)
25	Hutan Kota Pelangi
26	Penjaminan Mutu Pangan Segar (Sertifikat Pangan Segar)
27	Pemanfaatan Enceng Gondok
28	Kunyit Asam
29	AGRO TECHNO PARK (ATP) MUSI RAWAS
30	Lakso Antar (Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar)
31	CAS Filtration
32	Sistem Informasi Melalui Website Daerah (SI-MELDA)
33	Sistem Informasi Menara Telekomunikasi Online (SI-MENTOL)

No	Judul Inovasi
34	Gerakan Kampung KB
35	PLANDUKDAYAKAT (Pelayanan Data Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil)
36	SABER PENSI (Sapu Bersih Penderita Hipertensi)
37	AKRAB (Aksi Rabu Bina Desa)
38	VARIKAN (Variasi Menu Olahan Ikan)
39	Desa Kerukunan Umat Beragama
40	GITAR (Gerakan Ibu Pintar)
41	Virgin Coconut Oil (VCO)
42	e-Apel
43	Inkubator Bisnis dan Teknologi
44	PUSPA BUANA PARIKESIT (Puskesmas Peduli Pada Ibu dan Anak dengan Penanganan Komplikasi Risti Terpadu)
45	Website SIP WASKIM(Sistem Informasi Kawasan Permukiman)
46	ONE DAY ONE TEBUS (Satu Hari Satu Telur Rebus)
47	Keranjang Pahala
48	GARDUS (Gerakan Penjaringan TB Pari di Setiap Dusun dan Rompok)
49	Desinfektan Organik Covid-19
50	Kawasan Tanpa Asap Rokok (KAPOK)
51	SUMBER HARTA BERANTAS STUNTING (BERANTING)
52	Pepes Desa
53	Sistem Penyediaan Layanan Informasi Kelitbangan
54	PINDANG PAK TUWA (PINDAH DATANG PAKAI APLIKASI WA)
55	Gerakan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JEPANG)
56	GOJI (Gerakan Ojek Obat Jiwa)
57	UMA INOVASI SELANGIT
58	GERBUSEPUR (Gerakan Rabu Sehat Peduli Remaja)
59	JARAK SIKUNGKU
60	SEBAR UNDANGAN
61	Gerakan EMAS PAUD (Gerakan Edukasi Masyarakat Sekolah PAUD)
62	KAFE KURMA
63	LAN SERASAN (Lansia Sejahtera Sehat dan Mandiri)
64	SETANGKAI ASTER
65	JIWA RAGAM (JIWA RAMah keluarGA Masyarakat)
66	PPDB Online
67	GAPIT TOGA (GANG SEMPIT TANAMAN OBAT KELUARGA
68	“JEBOL PONED” (JEMPUT BOLA PELAYANAN OBSTETRI NEONATUS EMERGENSI DASAR)
69	SANGGAR GIZI “BERAKTING PRIMA” (Bersama Atasi Anak Stunting dan Peduli Resiko Maternal)
70	GENTAGAH SIBUNTING (Gerakan Pengentasan dan Pencegahan Gizi Buruk dan Stunting)
71	MARDAYA ASIEK (Mari Budayakan ASI Eksklusif)
72	AYO "ASIK" TEST IVA (AYO (ATASI SERVIK INFEKSI KANKER SERVIKS) MELALUI TEST IVA)

Sumber Data : Data Inovasi Daerah (Balitbang Kab. Musi Rawas)